

Dialog Evangelikal-Ekumenikal: Integrasi Gerakan Kekristenan dalam Membangun Demokrasi Indonesia

Harlinton Simanjuntak

Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia

harlinton.simanjuntak@reformedindonesia.ac.id

Abstract

This paper offers a concept of integrating Christian movements—particularly evangelical and ecumenical—as a form of participation in strengthening Indonesia's democracy, which is currently in decline. The weakening of public participation and the fragmentation of political institutions signal a democratic crisis that demands active involvement from civil society, including religious organizations. However, history shows that the gap between theological approaches and social praxis within evangelical and ecumenical movements has undermined their potential to drive social transformation. Drawing from Paulo Freire's thought on education as dialogue and liberating praxis, this paper argues that there is an opportunity for integration between evangelical and ecumenical movements through a collaborative approach referred to as the Dialogue Porch. This approach is understood as a reflective and practical space that integrates critical reflection and transformative action across Christian traditions. Using a qualitative method with a literature study approach, this paper demonstrates that evangelical-ecumenical collaboration can contribute to strengthening democratic values through three forms of praxis: contextual political education, inter-tradition discussion forums, and the revitalization of the Gospel in public life.

Keywords: Dialogue; Evangelical; Ecumenical; Integration; Democracy.

Abstrak

Tulisan ini menawarkan sebuah gagasan tentang integrasi gerakan kekristenan – khususnya evangelikal dan ekumenikal – sebagai bentuk partisipasi dalam memperkuat demokrasi Indonesia yang mengalami kemunduran. Fenomena melemahnya partisipasi publik dan fragmentasi kelembagaan politik menjadi penanda krisis demokrasi yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat sipil, termasuk organisasi keagamaan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa kesenjangan pendekatan teologis dan praksis sosial antara gerakan evangelikal dan ekumenikal telah melemahkan potensi keduanya dalam mendorong transformasi sosial. Bertolak dari pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan sebagai dialog dan praksis pembebasan, tulisan ini berpendapat bahwa terdapat peluang integrasi antara gerakan evangelikal-ekumenikal melalui pendekatan kolaboratif yang disebut sebagai *Teras Dialog*. Pendekatan ini dimaknai sebagai ruang reflektif dan praksis yang mengintegrasikan refleksi kritis dan aksi transformatif lintas tradisi kekristenan. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menunjukkan bahwa kolaborasi evangelikal dan ekumenikal dapat berkontribusi dalam penguatan nilai-nilai demokrasi melalui tiga bentuk praksis: pendidikan politik kontekstual, forum diskusi lintas tradisi, dan revitalisasi Injil dalam kehidupan publik.

Kata Kunci: Dialog; Evangelikal; Ekumenikal; Integrasi; Demokrasi.

Pendahuluan

Hasil riset *The Economist Intelligence Unit* (EIU) melaporkan bahwa kondisi demokrasi Indonesia masuk dalam kategori *flawed democracy*, yang mencerminkan kelemahan signifikan dalam budaya politik dan kebebasan sipil (Aulia, 2019; Girsang, 2025). Kategori ini ditentukan berdasarkan indikator seperti proses pemilu, pluralisme, partisipasi

politik, dan budaya politik. Salah satu indikator krusialnya adalah menurunnya partisipasi publik dalam proses-proses demokrasi substantif, bukan hanya dalam pemilu, tetapi juga dalam pengawasan publik terhadap lembaga negara. Sejalan dengan itu, pakar hukum tata negara menyoroti bahwa kemunduran demokrasi cenderung mengarah pada pemerintahan yang otoriter melalui otoritarianisme konstitusional—yaitu penggunaan instrumen hukum yang sah secara formal tetapi bertentangan secara substansial (Rizki, 2025). Situasi ini diperparah dengan kebijakan perluasan peran militer dalam pemerintahan sipil, yang menurut Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) berpotensi mengganggu kedaulatan peradilan dan meruntuhkan demokrasi, sebagaimana tercermin dalam enam alasan mereka menentang revisi UU TNI (Marwah, 2025). Data dan analisis ini mengindikasikan adanya dua persoalan mendasar yang menghambat konsolidasi demokrasi: melemahnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan strategis, dan fragmentasi kelembagaan politik yang mengurangi efektivitas pengawasan demokratis.

Dalam konteks kemunduran demokrasi tersebut, masyarakat sipil memiliki peran penting sebagai penyeimbang kekuasaan negara dan penggerak transformasi sosial yang berakar pada nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Salah satu unsur penting dalam masyarakat sipil Indonesia adalah lembaga keagamaan, yang tidak hanya memiliki pengaruh kultural yang luas, tetapi juga kapasitas moral dan spiritual dalam membentuk kesadaran publik. Di tengah tantangan demokrasi yang kompleks, lembaga keagamaan dituntut untuk lebih aktif mengambil peran sebagai agen perubahan sosial, bukan hanya dalam ranah etis-individual, tetapi juga dalam membangun struktur sosial yang lebih adil dan demokratis.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, lembaga keagamaan—khususnya Kristen—memiliki peran strategis dalam membangun dan memperkuat nilai-nilai demokrasi. Terdapat dua arus utama dalam gerakan kekristenan Indonesia, yaitu gerakan evangelikal dan ekumenikal. Gerakan evangelikal berorientasi pada signifikansi pemberitaan Injil dengan karakteristik penekanan pada pengalaman pribadi, berorientasi misi, dan komitmen hidup kudus (Timotius et al., 2022). Sementara, gerakan ekumenikal berorientasi pada dialog lintas

iman dan kolaborasi lintas denominasi dalam wadah Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) (Mamahit, 2020). Meski berbeda orientasi, kedua arus utama ini berpotensi membangun sinergi dalam memperkuat demokrasi dengan spirit keugaharian dalam dialog evangelikal-ekumenikal yang berdampak nyata.

Dalam bukunya *Pendidikan Kaum Tertindas*, Paulo Freire menekankan dialog sebagai proses memanusiakan manusia yang terintegrasi dalam refleksi dan aksi. Freire mendefinisikan dialog sebagai ruang perjumpaan antarmanusia untuk menamai dunia dan dimediasi dunia (Freire, 2024)—suatu proses penyadaran kritis. Konsep praksis Freire mengenai integrasi refleksi-aksi ini digunakan dalam tulisan ini untuk memperkuat spirit membangun dan memperkokoh demokrasi Indonesia, khususnya dalam menciptakan ruang dialog antara gerakan evangelikal dan ekumenikal melalui pendidikan sosial yang bersifat dialogis-kritis dan partisipatoris. Pendidikan itu menekankan bahwa pendidikan sejati bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi sebuah proses membangun kesadaran kritis untuk menjadi agen perubahan personal dan sosial.

Dengan demikian, esai argumentasi ini akan mengelaborasi bagaimana dialog antara gerakan evangelikal dan ekumenikal dapat diwujudkan dengan spirit keugaharian dan berkontribusi memperkuat demokrasi di Indonesia dengan membangun kesadaran kritis insan evangelikal dan ekumenikal sehingga menjadi agen perubahan sosial? Melalui dialog ala Freire ini diharapkan dapat menjadi ruang perjumpaan inklusif yang mampu menghargai perbedaan dan membangun kerja sama untuk mencapai transformasi personal dan sosial yang adil dan demokratis.

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap buku Paulo Freire (Freire, 2024), serta literatur yang membahas gerakan evangelikal dan ekumenikal di Indonesia (Aritonang, 2021; Mamahit, 2020; Timotius et al., 2022). Tulisan ini dilakukan secara reflektif-argumentatif untuk merumuskan gagasan integrasi melalui dialog yang bersifat kritis dan transformatif dalam konteks demokrasi Indonesia.

Pemikiran Paulo Freire: Pendidikan sebagai Dialog dan Pembebasan

Pemikiran Paulo Freire tentang Pendidikan Kaum Tertindas lahir dari pergulatan panjang dalam masa pengasingan politik—sebuah masa di mana ia sempat tersandera oleh ketakutan akan kebebasan. Namun, pengalaman itu justru menyadarkannya akan tanggung jawab sebagai individu dalam merespons ketidakadilan sosial yang tersistem. Dalam refleksinya, Freire menyoroti bahwa sektarianisme-fanatisme bertentangan dengan sikap radikal-kritis. Baginya, sikap radikalisme yang kritis justru melahirkan kreativitas atau daya cipta melalui perjuangan untuk membebaskan manusia dari realitas penindasan (Freire, 2024).

Freire melihat bahwa dehumanisasi adalah akar masalah dalam kemanusiaan sebagai sebuah upaya mengingkari harkat dan martabat manusia melalui ketidakadilan sosial dan eksloitasi yang disebut sebagai penindasan. Penindasan merupakan sistem yang dibentuk dan dipelihara dengan menciptakan relasi kuasa antara penindas dan yang tertindas. Menurutnya, baik penindas maupun yang tertindas, keduanya adalah korban dehumanisasi. Karena itu, keduanya harus dibebaskan (Freire, 2024).

Freire menekankan bahwa kebebasan adalah natur dari kemanusiaan yang hakiki, karena itu ia harus diraih; tetapi, dalam konteks dehumanisasi, perjuangan meraih kebebasan ada di tangan kaum yang tertindas. Namun, mereka menghadapi dilema antara kebebasan dan ketakutan. Bagi Freire, pendidikan sosial—pendidikan kaum tertindas—adalah solusi untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Pendidikan sosial bertugas untuk membangunkan kesadaran kritis dengan menciptakan rasa solidaritas melalui penyingkapan realitas penindasan dan praksis perubahan (Freire, 2024).

Freire menegaskan bahwa pendidikan sosial harus lahir dari cinta yang sejati yaitu cinta kepada kehidupan. Dari sana, ia akan bergerak untuk menghargai kehidupan, yaitu menghargai natur ontologis manusia. Dengan demikian, kaum yang tertindas dan penindas dapat bersolidaritas dalam memperjuangkan kebebasan mereka. Pembebasan tersebut bukan sekadar aktivisme intelektual melainkan sebuah praksis kehidupan (Freire, 2024).

Freire percaya bahwa praksis kehidupan hanya lahir dari integrasi refleksi dan aksi yang diejawantahkan melalui dialog yang kritis dan membebaskan. Dialog adalah sarana yang mentransformasi kehidupan manusia berdasarkan cinta kasih, kerendahan hati, iman, harapan, dan pemikiran kritis—sesuai dengan nilai-nilai etis kekristenan. Ia dimulai dengan sikap bertanya kepada diri sendiri; kemudian, dilakukan diskursus terhadap antarpandangan dari kedua belah pihak (Freire, 2024).

Menurut Freire, dialog sebagai praksis pendidikan pembebasan diwujudkan melalui kerja sama, penyatuan, organisasi, dan tindakan budaya. Kerja sama hanya dapat dibangun dengan komunikasi tanpa paksaan, tanpa praktik manipulatif, tanpa penaklukkan, dan tanpa pelabelan. Sementara, penyatuan dan organisasi merupakan upaya menyatukan dan mengorganisir antarkaum yang tertindas dengan tujuan pembebasan. Terakhir, tindakan budaya adalah perwujudan aksi yang tersistematisasi dan terencana yang bertujuan mempertahankan atau mengubah struktur sosial (Freire, 2024).

Dengan demikian, dialog merupakan instrumen percakapan yang memiliki tujuan hakiki untuk mem manusiakan manusia berdasarkan manifestasi nilai-nilai etis kekristenan melalui langkah-langkah konkret yang terukur dan dapat dilakukan. Dalam konteks dialog evangelikal-ekumenikal cinta kasih, kerendahan hati, iman, pengharapan, dan kesadaran menjadi kata kunci untuk menciptakan dialog yang kritis di antara keduanya. Di mana, dialog evangelikal-ekumenikal dilakukan dengan berorientasi kepada lima dasar tersebut sebagai prinsip etis membangun interaksi dan kolaborasi, sehingga kepelbagaiannya di dalam kedua kelompok tersebut dapat diintegrasikan di atas dasar yang sama tanpa meniadakan perbedaan.

Kesenjangan antara Evangelikal dan Ekumenikal dalam Konteks Indonesia.

Gerakan kekristenan di Indonesia memang terpolarisasi ke dalam dua arus utama, yaitu gerakan evangelikal dan ekumenikal, di mana kehadiran mereka turut mewarnai dinamika demokrasi di Indonesia. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kedua kelompok tersebut ternyata

telah terpolarisasi jauh sejak era transisi dari imperialisme-kolonialisme ke nasionalisme negara-negara di dunia. Mereka memiliki kesenjangan pandangan teologi dalam konteks misi, di mana kelompok ekumenikal memiliki orientasi kepada aspek antropologis-sosiologis, sementara kelompok evangelikal berorientasi kepada aspek antropologis-psikologis (Aritonang, 2021).

Dalam konteks menafsirkan Alkitab, kelompok ekumenikal berangkat dari konteks lalu kepada teks; sementara, kelompok evangelikal bertolak dari teks ke konteks. Dalam ranah dialog, bagi kaum evangelikal, dialog merupakan percakapan dalam rangka pekabaran Injil; sedangkan, bagi kaum ekumenikal, dialog adalah ruang perjumpaan untuk saling tenggang rasa dalam interaksi lintas iman (Aritonang, 2021).

Menurut Aritonang, perbedaan kedua arus utama gerakan kekristenan tersebut berakar pada cara mereka berteologi; evangelikal fokus pada penjangkauan jiwa dan pertumbuhan jemaat, sementara ekumenikal fokus pada implikasi Injil ke dalam konteks sosial dan politik (Aritonang, 2021).

Karena itu, realitas tersebut menghambat kekristenan untuk terlibat dalam kerja-kerja demokrasi di Indonesia. Untuk menghubungkan kedua kelompok tersebut supaya memiliki daya cipta yang utuh dan solid untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang berdasar kepada nilai-nilai etis alkitabiah, maka dengan memakai pemikiran Freire, perlu diciptakan dialog evangelikal-ekumenikal dengan semangat keugaharian melalui ‘teras dialog’ yang memiliki filosofi kesederhanaan, kekeluargaan, kesanggrahan, dan kesadaran kolektif.

Konsep ini mendorong dialog evangelikal-ekumenikal dari perspektif yang memungkinkan keduanya memiliki kesamaan di dalam kepelbagaian. Atau dengan kata lain, ada tujuan yang sama sekalipun keduanya memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut tersirat dalam doa Tuhan Yesus (Yoh. 17) yaitu supaya gereja-gereja Tuhan menjadi satu di dalam kekudusan.

Nababan dan Sumampouw mengatakan bahwa kesatuan orang-orang percaya “memiliki arah yang satu untuk memuliakan nama Allah dalam rencana kekal-Nya (Nababan & Sumampouw, 2023, hal. 112).”

Sementara, Iswadi Prayidno menekankan bahwa kesatuan orang percaya adalah kehendak Allah di mana Allah sebagai dasar kesatuannya (Prayidno, 2020). Selanjutnya, Samuel Hans Kristanto melihat dari konteks oikumene dalam pemahaman Alkitab, oikumene menawarkan kesatuan dan moderasi beragama dalam konteks kekristenan untuk menyatukan berbagai gerakan kekristenan dan mengimplementasikan nilai-nilai moderasi yang alkitabiah dalam konteks sehari-hari (Kristanto, 2024). Maka, kepelbagaian orang percaya khususnya dalam konteks gerakan evangelikal dan ekumenikal di Indonesia juga menuju kepada tujuan yang sama yaitu mengabdi kepada Allah dengan prinsip keugaharian dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pengabdian tersebut diikat oleh kesatuan di dalam kekudusan, sebab Allah yang menghendaki kesatuan itu adalah Allah yang kudus.

“Teras Dialog”: Ruang Perjumpaan Dialog Evangelikal-Ekumenikal

Konsep ‘Teras Dialog’ disadur dari semangat filsafat stoisme—yaitu prinsip-prinsip stoisme yang relevan untuk digunakan dan bukan untuk menggabungkan filsafat stoisme dengan dialog dalam konteks pendidikan ala Paulo Freire—with menggambarkan ruang perjumpaan yang sederhana, inklusif, dan realistik, tempat di mana manusia dapat hidup selaras dengan naturnya dan lingkungannya (Manampiring, 2019). Teras, dalam pengertian ini, menjadi simbol keterbukaan dalam keugaharian, kekeluargaan, keramahan dan penerimaan dalam kepelbagaian. Ia menggambarkan sikap kesadaran akan eksistensi yang lain, tanpa mengingkari identitas masing-masing dan menjadi ruang yang memungkinkan setiap pihak dapat berinteraksi dan berkolaborasi, tanpa membatasi berbagai potensi manifestasinya.

Dalam konteks kekristenan di Indonesia, kesenjangan antara kaum evangelikal dan ekumenikal terletak pada cara mereka berteologi yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut seharusnya dilihat sebagai sebuah keniscayaan, bahwa Sang Ilahi menghendaki kepelbagaian di dalam kesatuan—di mana keunikan dan kekhasan dari masing-masing tradisi iman dapat saling melengkapi. ‘Teras Dialog’ menjadi simbol kebersamaan di mana kepelbagaian, pembelajaran, dan kerja sama lintas

tradisi dapat dibangun dan dikembangkan. Memungkinkan terciptanya integrasi di dalam kepelbagaian.

Dalam konteks pluralitas Indonesia, ‘Teras Dialog’ memberi ruang kemungkinan lahirnya kesadaran kolektif akan signifikansi peran gereja dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan sosial. Merujuk pada pemikiran Paulo Freire tentang dialog sebagai praksis pembebasan, kaum evangelikal dan ekumenikal dapat mengintegrasikan cara mereka berteologi dengan sikap saling terbuka dan berkolaborasi serta dibangun di atas dasar tujuan yang sama yaitu satu di dalam kekudusan. Manifestasi konkret gagasan ini dapat berupa: (1) kerja sama dalam bidang pendidikan teologi politik yang kritis dan kontekstual; (2) diseminasi visi *ut omnes unum sint* (Yoh. 17:17-21) melalui forum digital dan lintas tradisi gerakan kekristenan; serta (3) revitalisasi pemahaman Injil sebagai kekuatan transformasi personal dan sosial dalam kehidupan berdemokrasi, tanpa membenturkan nilai-nilai Injil dengan fragmentasi sekuler maupun religius.

Ketiga bentuk konkret gagasan tersebut didasarkan kepada satu tujuan yang sama sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam doa-Nya (Yoh. 17) bahwa di dalam kepelbagaian gerakan evangelikal dan ekumenikal, mereka menjadi satu di dalam kekudusan sebagaimana Allah Tritunggal yang memanggil dan menyatukan gereja-Nya adalah Allah yang beragam dalam karya-karya-Nya tetapi satu di dalam hakikat kekudusan-Nya.

Satu di dalam kekudusan menjadi kata kunci untuk mengintegrasikan gerakan evangelikal dan ekumenikal dalam konteks membangun demokrasi di Indonesia. Dialog evangelikal-ekumenikal yang dibangun dengan spirit keugaharian atas tujuan integrasi di dalam kekudusan menjadi dasar membangun kesadaran kritis tersebut. Kesadaran itu dibangun melalui dialog yang diawali dengan bertanya, kemudian dilanjutkan dengan diskursus. Bertanya bagaimana keduanya dapat menciptakan kolaborasi tanpa mendiskreditkan antara yang satu dengan yang lain? Bagaimana keduanya dapat berkontribusi dalam konteks demokrasi di Indonesia untuk mentransformasi kehidupan personal dan sosial di dalam masyarakat? Bagaimana keduanya dapat

menjadikan kesatuan di dalam kekudusan sebagai spirit untuk mentransformasi kehidupan demokrasi di Indonesia?

Dalam praktiknya, kelompok evangelikal dan ekumenikal harus memiliki sikap dan kesadaran bahwa setiap cara yang dilakukan dalam berteologi semata-mata untuk mencapai kesatuan di dalam kekudusan. Melalui dialog, keduanya harus melepaskan preposisi yang membentengi terciptanya peluang integrasi. Keduanya harus melihat bahwa polarisasi yang terbentuk melalui kesenjangan praktik berteologi sebagai sebuah bentuk dehumanisasi dari gerakan kekristenan. Demikian pula, mereka juga harus melihat bahwa mereka adalah sesama pihak yang tertindas, sehingga mendorong keduanya untuk menjadi pihak yang mengupayakan pembebasan dari penindasan karena perbedaan mereka dalam berteologi telah membentuk polarisasi yang tajam.

Dengan demikian, ‘Teras Dialog’ bukan sekadar ruang diskusi simbolik, melainkan sebuah paradigma tentang komitmen bersama dan praksis gerejawi yang membumi—menghadirkan gereja sebagai komunitas iman yang mentransformasi setiap personal sekaligus agen perubahan sosial dalam memperkuat demokrasi dan menegakkan keadilan sosial yang inklusif, melampaui fragmentasi tradisi teologi yang berbeda.

Kesimpulan

Indonesia yang plural dengan demokrasi yang dinamis merupakan sebuah keniscayaan dan kesempatan bagi pertemuan atau integrasi dua arus utama kekristenan, yakni evangelikal dan ekumenikal. Cara mereka berteologi yang berbeda sejatinya bukanlah penghalang, melainkan kesempatan untuk menciptakan kolaborasi yang memperkuat nilai-nilai demokrasi melalui dialog yang berakar pada semangat keugaharian. Berdasarkan pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan sebagai dialog dan pembebasan, gereja memiliki tugas untuk menghadirkan sarana perubahan sosial melalui individu-individu yang telah ditransformasi secara personal yang menciptakan kesadaran kritis melalui integrasi refleksi dan aksi secara konkret.

Gagasan ‘Teras Dialog’ hadir sebagai simbol praksis—menjadi ruang perjumpaan dan kolaborasi bagi berbagai tradisi teologi yang berbeda di antara kelompok evangelikal dan ekumenikal untuk menciptakan sinergitas dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan sosial di Indonesia. Gagasan ini bukan sekadar menegaskan signifikansi penghargaan dan penghormatan terhadap perbedaan dan keberagaman di antara keduanya, tetapi juga mengarahkan gereja-gereja untuk berperan aktif dalam pendidikan sosial-politik, misi profetik, dan pelayanan publik. Dengan demikian, gereja hadir sebagai komunitas iman yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman yang dinamis dalam membentuk masyarakat Indonesia yang inklusif dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, A. (2021). Book Review : Misi Dalam Pandangan Ekumenikal dan Evangelikal Asia 1910-1961-1991. *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 17(2), 209–213.
<https://doi.org/10.46494/psc.v17i2.153>
- Aulia, Y. (2019). Aktualisasi Kebebasan Berpendapat di Negara Demokrasi yang Lemah: Perbandingan Indonesia dan Singapura. *Padjajaran Law Review*, 7(2), 1–14.
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/download/446/308>
- Freire, P. (2024). *Pendidikan Kaum Tertindas* (Yuhda Wahyu Pradana (penerj.)). Narasi.
- Girsang, V. I. (2025). *Riset EIU: Indeks Demokrasi Indonesia Masuk Kategori Flawed Democracy*. tempo.co.
<https://www.tempo.co/politik/riset-eiu-indeks-demokrasi-indonesia-masuk-kategori-flawed-democracy-1215360>
- Kristanto, S. H. (2024). Oikumene dalam Pemahaman Alkitab. *Coram Mundo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 6(2), 95–102. <https://doi.org/10.55606/corammundo.v6i2.388>
- Mamahit, F. Y. (2020). Sikap Ekumenikal dan Evangelikal terhadap Agama-agama Lain: Sebuah Analisis Perbandingan Historis-

- Teologis. *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 5(1), 71–92. <https://doi.org/10.30648/dun.v5i1.329>
- Manampiring, H. (2019). *Filosofi Teras: Filsafat Yunani-Romawi Kuno untuk Mental Tangguuh Masa Kini*. Penerbit Buku Kompas.
- Marwah, H. (2025). *Sejumlah Alasan Mengapa UU TNI Perlu Dibatalkan*. tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/sejumlah-alasan-mengapa-uu-tri-perlu-dibatalkan-1222371>
- Nababan, N. R. H., & Sumampouw, J. (2023). Memaknai Kesatuan Orang-orang Percaya menurut Yohanes 17:20-23. *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta*, 6(1), 112–129. <https://doi.org/10.47167/kharis.v6i1.224>
- Prayidno, I. (2020). Supaya Mereka Semua Menjadi Satu (Refleksi Teologis Yoh 17:20-23). *Lux et Sal: Jurnal Teologi*, 1(2), 73–82. <https://jurnal.imavi.org/index.php/luxetsal/article/view/13/14>
- Rizki, M. J. (2025). *Mewaspadai Tren Otoritarianisme di Tengah Penurunan Demokrasi*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mewaspadai-tren-otoritarianisme-di-tengah-penurunan-demokrasi-lt6800c99121b08/?page=all>
- Timotius, Sni, O., Susanto, J. L., Bintoro, W., & Dewi. (2022). Menyingkap Perbedaan Mendasar: Evangelikalisme dan Fundamentalisme – Tidak Serupa Meskipun Terkait. *Indonesia Journal of Religious*, 5(2), 109–126. <https://indonesiastt.ac.id/journal/index.php/ijr/article/view/23/14>